

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan**

Dalam konsep Pendidikan Kewarganegaraan ini akan dijelaskan mengenai pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, fungsi Pendidikan Kewarganegaraan, ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan dan pendekatan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk pengertian Pendidikan Kewarganegaraan akan dijelaskan sebagai berikut.

##### **a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) merupakan konsep universal yang meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik, tentang persiapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara menyeluruh, dan secara umumnya menjelaskan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan diartikan secara luas meliputi proses penyiapan generasi muda untuk berperan dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Secara spesifik, peran pendidikan yang dimaksud termasuk persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut (Kerr, 1999:6). Kurikulum kewarganegaraan terdiri dari pelajaran akademis yang fokus pada pemahaman institusi demokratis, perkembangan kemampuan dan perilaku yang dibutuhkan dalam proses demokratis, dan apresiasi

dan demonstrasi dari nilai dan prinsip inti yang penting untuk kehidupan kewarganegaraan (Wilcox, 2011:27).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua arti, yaitu *civic education* dan *citizenship education*. *Civic education* diartikan sebagai suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara berusia muda. Diharapkan kelak ketika mereka dewasa, mereka mampu berperan aktif dalam masyarakat. Sedangkan *citizenship education* adalah pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah. Pengalaman tersebut bisa terjadi di lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, ataupun berbagai media yang membantu mereka untuk bisa menjadi warga negara seutuhnya (Cogan, 1999:4). *Civic education* merupakan sebuah bidang yang banyak digunakan untuk bahan penelitian dan praktik yang menghasilkan inovasi pendidikan yang signifikan (Carretero dkk, 2016:295).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dari bahasan mata pelajaran yang lain. Ciri-ciri PPKn adalah (a) merupakan program pendidikan; (b) materi pokoknya adalah demokrasi politik atau peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ditambah unsur lain yang mempunyai unsur positif terhadap pengembangan peranan tersebut, baik yang berasal dari keluarga, sekolah dan masyarakat, (c) tujuannya membina peranan warga negara agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan konstitusi (Branson, 1999: 29-30). Berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan bagi para generasi muda, keberadaan kurikulum pendidikan kewarganegaraan

telah berkontribusi untuk memperkenalkan tentang nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia kepada generasi muda, yang tidak pernah ada di sejarah negara modern (Semela dkk, 2013:160). Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam memberikan informasi kepada warganegara tentang keuntungan mempunyai kualitas pemerintahan yang baik, bertentangan dengan tradisi yang demokratis sebelumnya.

Pandangan berbeda pada Giroux, (1980:331) mengartikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan akan berjalan dengan sendirinya agar menciptakan masyarakat yang lebih mulia dan adil, membebaskan diri dari beban intelektual dan ideologisnya sendiri, maka ia harus mengembangkan rasionalitas baru dan problematis dalam memeriksa hubungan antar sekolah dan masyarakat luas. Dalam pandangan Giroux untuk menjadikan warga negara yang mulia dan adil maka warga negara berhak untuk mengembangkan rasionalitasnya sendiri dan membebaskan diri dari ideologinya. Pada hakikatnya, pengertian civic education berbeda-beda berdasarkan para ahli, namun hal tersebut merujuk pada pengertian yang sama (Bayeh, 2016:2).

#### **b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Dalam model Pendidikan Kewarganegaraan Yunani, pendidikan dirancang untuk mendidik warga negara guna berperan serta aktif dalam kegiatan masyarakat sipil. Dalam hal ini, kecerdasan diasumsikan sebagai bagian dari etika, manifestasi ide dan demokrasi doktrin bagi kehidupan yang lebih baik dan adil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan ini, tujuan

dari pendidikan adalah menumbuhkan pembentukan karakter yang baik dalam usaha menemukan kebebasan hidup. Sehingga, kebebasan tersebut dapat selalu diciptakan dan hubungan antara individu dan masyarakat didasarkan pada perjuangan terus menerus untuk menciptakan komunitas politik yang adil dan layak (Giroux, 1980:330).

Mengetahui misi Pendidikan Kewarganegaraan yang sangat luas, maka tujuan PPKn juga perlu diperluas. Secara teoritis, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mendidik para siswa agar kelak menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang mampu berpartisipasi dengan aktif dalam masyarakat yang demokratis (Bakry, 2010: 38). Dengan kata lain, tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah mewujudkan masyarakat yang sadar dan membela negaranya berlandaskan pengetahuan dari politik kebangsaan dan peka terhadap pengembangan jati diri dan moral bangsa di kehidupan bangsa Indonesia ini (Azra, 2008:5). Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi dari warganegara yang memperoleh informasi dan aktif yang bertanggungjawab dan mampu tampil bijaksana dan bertindak efektif (Kocoska & Petrovski, 2013:1461) Lebih lanjut, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan secara umum menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) adalah untuk menciptakan warga negara yang lebih baik *to be good citizens* serta menjadi warga negara yang memiliki kecerdasan *civic intelligence* yang baik, sosial, spiritual maupun emosional, tanggung jawab dan memiliki rasa bangga *civic responsibility*; dapat berpartisipasi di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian dari Rehaj (2017:56) menyebutkan bahwa peran dari Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki nilai Pancasila, UUD 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, serta berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk peserta didik menjadi warganegara yang mempunyai jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempunyai semangat Bhineka Tunggal Ika dan mempunyai kepekaan dalam menembangkan jati diri dan moral bangsa.

Secara ringkas, tujuan PPKn adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan mempersiapkannya untuk masa depan bangsa (Cholisin, 2004:12). Definisi lain dari warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara sehingga mampu berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Soemantri, 1976: 29). Pandangan lain dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah untuk membentuk masyarakat yang aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemerintah guna mewujudkan warga negara yang adil, bertanggung jawab dan demokratis (Horak, 2015: 2).

Selain itu tujuan dari PPKn sebagai pengetahuan dalam meningkatkan ketaqwaan, mempertinggi budi pekerti, mencerdaskan bangsa, sebagai warga negara yang terampil, serta memperoleh semangat sebagai manusia yang handal dan dapat tumbuh, mandiri dan bertanggung jawab atas pembangunan (Kartika, 2016:21).

Di era milenial sekarang ini, para generasi muda dituntut untuk berfikir kritis tentang isu-isu terkini yang sedang terjadi, terutama mengenai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini tentu berbeda dengan pendidikan jaman dahulu yang tidak memberikan banyak ruang bagi peserta didik karena berbagai keterbatasan yang ada. Cohen dkk (2013:123-124) berpendapat bahwa kurikulum dan pendidikan tradisional tidak melibatkan peserta didik dan memberikan pertimbangan tentang warganegara yang bagaimana yang mereka inginkan dan mengapa mereka menginginkannya, atau apakah mereka mendorong peserta didik untuk berfikir tentang nilai-nilai kewarganegaraan sebagai dasar dari pembangunan kewarganegaraan dan perjanjian kewarganegaraan. Secara umum, tujuan PPKn adalah untuk membentuk moral siswa agar menjadi warga negara yang baik. Sehingga diharapkan kelak para siswa tersebut mampu menjadi generasi penerus yang berkontribusi lebih untuk kemajuan bangsa dan negara.

### **c. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan**

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat penting dalam proses demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah salah satu faktor di masyarakat yang bertujuan mempersiapkan warga negara untuk perpikir kritis, menjamin hak-hak mereka, serta dapat bersikap secara demokratis yang dapat dilakukan dengan kegiatan penguatan kesadaran terhadap masyarakat (Fesnic, 2016: 966-978). Seperti yang telah diketahui, bahwa pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran pokok yang membawa misi pembentukan karakter warga negara yang lebih baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk

membekali siswa dengan pengetahuan berbangsa dan bernegara yang baik, sehingga diharapkan kelak mereka akan menjadi warga negara yang baik dan cerdas, berkarakter, memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara, dan berakhlak mulia. Di dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, berbuat baik kepada siapa saja, mempunyai pendidikan moral yang baik, dan aspek nilai-nilai yang saling berhubungan (Ainley, Schulz, & Friedman, 2013: 400).

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas warga negara Indonesia serta memiliki keterampilan atau kreatifitas untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara (Maulana, 2013:75). Maka dari itu, fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk pribadi peserta didik menjadi warganegara yang sadar akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan tujuan untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berkualitas. Raatma (2014:33) berpendapat bahwa warga negara Indonesia yang baik dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik juga. Hal tersebut berarti ketika siswa mampu untuk membantu komunitas, keluarga, dan lingkungan disekitarnya, hal ini berarti mereka telah mengimplementasikan bagaimana usaha untuk menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik akan tahu bahwa perannya akan mempengaruhi orang lain dan dibutuhkan oleh negara. Maka dari itu, mereka mencoba membuat pilihan yang bagus mengenai apapun yang mereka lakukan. Secara garis besar, fungsi PPKn bagi siswa dapat dilihat ketika mereka mulai mampu mengimplementasikan di kehidupan mereka berkaitan dengan nilai-nilai PPKn yang mereka dapat pada pelajaran dikelas.

Implementasi pendidikan kewarganegaraan yang berhasil seharusnya memberikan pelatihan kepada warganegara dalam melatih hak dan kewajiban mereka dibawah lingkungan demokratis dimana mereka tinggal dan bekerja (Kocoska & Petrovski, 2015:1461).

#### **d. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan merupakan disiplin khusus di sekolah, diharapkan mampu membawa siswa untuk belajar tentang kondisi kehidupan di masyarakat. Maksudnya bagaimana mereka dapat menjadi individu yang terkait dengan masyarakat, dan bagaimana mereka bisa memaknai ketika menjadi seorang warga negara yang memahami hak dan tanggungjawabnya. Dengan kata lain Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa agar berguna dalam masyarakat yang modern (Frimannsson, 2001: 303). Sekolah dipandang sebagai media yang tepat dalam melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan dengan skala yang lebih luas. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan dampak dengan menjangkau isu-isu sosial yang ada diluar sekolah (McMurray dan Niens, 2012: 208).

Dalam perkembangannya, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sebatas pendidikan di dalam kelas saja, lebih luas lagi Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan secara ekstrakurikuler dan tersirat di lingkungan sekolah (Wong, Lee, Chan, dan Kennedy, 2016: 6). Dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fleksibilitas sehingga dapat diterapkan dalam berbagai program. Ada tiga model yang dapat dilakukan dalam menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup persekolahan, selain

sebagai intrakurikuler, juga melalui ko-kurikuler dan ekstrakurikuler (EACEA, 2017: 29-30).

Kokurikuler merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan berdampingan dengan kegiatan intrakurikuler Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984:29) “Kegiatan kokurikuler bertujuan agar siswa lebih mendalami dan menghayati bahan yang dipelajari pada intrakurikuler, baik program inti maupun program khusus. Kegiatan tersebut dilaksanakan perorangan atau kelompok. Kokurikuler adalah pekerjaan rumah atau penugasan yang menjadi pasangan kegiatan tatap muka. Ko-kurikuler merupakan kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk waktu libur) yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai hubungan antara berbagai jenis pengetahuan, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. (Usman dan Setiawati, 1993:17)

Kegiatan ini sebenarnya sudah mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Namun demikian, tetap diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik atau merevitalisasi kegiatankegiatan ko-kurikuler tersebut agar dapat melaksanakan pendidikan karakter kepada siswa. (Narwanti, 2011:55). Asas pelaksanaan ko-kurikuler Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler hendaknya memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 1) Menunjang langsung kegiatan intrakurikuler. 2) Adanya hubungan yang jelas dengan pokok bahasan yang diajarkan. 3) Tidak menjadi beban berlebihan bagi siswa yang dapat mengakibatkan gangguan fisik atau psikologis. 4) Tidak menimbulkan beban pembiayaan yang memberatkan siswa atau orangtua siswa (Narwanti, 2011:18)

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program kokurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang memiliki minat mengikuti kegiatan tersebut. Melalui bimbingan dan pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa.

Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Memperluas diri ini dapat dilakukan dengan memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap atau nilai-nilai.

Pengertian ekstrakurikuler menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:291) yaitu: "suatu kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa". Kegiatan ekstrakurikuler sendiri dilaksanakan diluar jam pelajaran wajib. Kegiatan ini memberi keleluasaan waktu dan memberikan kebebasan pada siswa, terutama dalam menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan bakat serta minat mereka. Menurut Rusli Lutan (1986:72) ekstrakurikuler adalah: Program ekstrakurikuler merupakan bagian internal dari proses belajar yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak didik. Antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kegiatan ekstrakurikuler perpanjangan pelengkap atau penguat kegiatan intrakurikuler untuk menyalurkan bakat atau pendorong perkembangan potensi anak didik mencapai tarap maksimum. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, dapat penulis kemukakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang menekankan kepada

kebutuhan siswa agar menambah wawasan, sikap dan keterampilan siswa baik diluar jam pelajaran wajib serta kegiatannya dilakukan di dalam dan di luar sekolah.

Tujuan kegiatan dalam ekstrakurikuler dijelaskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995: 2) yakni, *pertama*, siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan keterampilan mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya yang, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berbudi pekerti luhur; memiliki pengetahuan dan keterampilan; sehat rohani dan jasmani; berkepribadian yang mantap dan mandiri; memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. *Kedua*, siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan. Dari penjelasan diatas pada hakeketnya tujuan kegiatan ekstrakurikuler yang ingin dicapai adalah untuk kepentingan siswa. Dengan kata lain, kegiatan ekstrakurikuler memiliki nilai-nilai pendidikan bagi siswa dalam upaya pembinaan manusia seutuhnya.

Kegiatan ekstrakurikuler tentu berbeda-beda jenisnya, karena banyak hal yang memang berkaitan dengan kegiatan siswa selain dari kegiatan inti. Dengan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada, siswa dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan di sekolah dijelaskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995: 3) sebagai berikut (a) Pendidikan kepramukaan (b) Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) (c) Palang Merah

Remaja (PMR) (d) Pasukan Keaman Sekolah (PKS) (e) Gema Pencinta Alam (f) Filateli (g) Koperasi Sekolah (h) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (i) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) (j) Olahraga (k) Kesenian.

Kegiatan ekstrakurikuler tersebut berbeda-beda sifatnya, ada yang bersifat sesaat dan ada pula yang berkelanjutan. Kegiatan yang bersifat sesaat seperti karyawisata dan bakti sosial, itu hanya dilakukan pada waktu sesaat dan alokasi waktu yang terbatas sesuai dengan kebutuhan, sedangkan yang sifatnya berkelanjutan maksudnya kegiatan tersebut tidak hanya untuk hari itu saja, melainkan kegiatan tersebut telah diprogramkan sedemikian rupa sehingga dapat diikuti terus sampai selesai kegiatan sekolah.

Kokurikuller dan ekstrakurikuller merupakan suatu kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan budaya pesantren sebagai kokurikuller, karena budaya pesantren menunjang pelaksanaan intrakurikuler dan berhubungan jelas dengan pokok bahasan yaitu pendidikan kewarganegaraan tentang pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural. Ekstrakurikuler pramuka merupakan kegiatan tambahan yang berada disekolah dan diluar sekolah. kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap atau nilai-nilai. Maka penulis menggunakan ekstrakurikuler pramuka sebagai penunjang pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural. Ekstrakurikuler pramuka dan Budaya PPKn merupakan sebagai pelengkap dari intrakurikuller pendidikan kewarganegaraan

karena dengan budaya pesantren dan ekstrakurikuler pramuka dapat membina karakter kewarganegaraan multikultural.

Selanjutnya Pendidikan Kewarganegaraan pada pendidikan formal dapat berupa intrakurikuler atau mata pelajaran yang direncanakan untuk mempersiapkan siswa kelak menjadi warga negara berpengetahuan, bertanggungjawab, partisipatif, dan komitmen terhadap nilai dan moral sehingga mereka memiliki kecakapan untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat (Boon-Yee dan Print, 2005: 58-71; Samsuri (2011: 28). Pendidikan Kewarganegaraan yang berupa mata pelajaran di Indonesia yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, secara mendasar bertujuan untuk menjadikan siswa cerdas, bermartabat dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Alhakim dan Suparlan, 2016: 9). Secara personal, Ubaedillah dan Rozak (2015: 6) menambahkan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk kualitas kepribadian warga negara yang baik.

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 32 Tahun 2013. Ruang Lingkup dari mata pelajaran PPKn untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek sebagai berikut: Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam bidang lain terutama ilmu sosial akan dijabarkan lebih detail. Selanjutnya, ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum inti berada pada lingkup nasional sehingga tidak memungkinkan adanya unsur daerah yang masuk. Dengan demikian, ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan menjadi tujuan yang global dalam aspek kompetensi kewarganegaraan (Kennedy & Brunold, 2016: 154).

Berdasarkan ruang lingkup diatas, cakupan materi Pendidikan Kewarganegaraan begitu luas. Materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut meliputi pendidikan moral, norma, agama, peraturan hukum, hak dan kewajiban warganegara, serta politik dan kekuasaan (Patrick dan Vontz, 1999:34). Dari beberapa materi diatas, diharapkan peserta didik bisa mengamalkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka sehingga terbentuk karakter kewarganegaraan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

#### **e. Pendekatan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendekatan terintegrasi (*integrated approach*) merupakan salah satu terobosan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan ini diklaim memiliki banyak manfaat khususnya di bidang sosial dan sudah mulai dikembangkan di sekolah-sekolah. Penekanan pada integrasi pengetahuan terletak pada integrasi teori dan praktek serta pengalaman di sekolah yang utuh dan telah menjadi perhatian yang mendalam selama puluhan tahun terakhir (Peletier dan Cooper, 1991: 256). Selain itu, pendekatan terintegrasi dalam pengajaran dan pembelajaran telah dikenal dalam bidang pendidikan bahasa sebagai sebuah

pendekatan yang menghindari terpecahnya pengetahuan dan mengarah pada pemahaman yang menyeluruh pada sebuah konsep. Pendekatan ini juga dijadikan sebagai organisasi terdahulu pada pembelajaran kognitif karena otak manusia menolak konsep pembelajaran yang terpecah. Pendekatan terintegrasi juga membuat siswa memiliki pembelajaran yang lebih baik (Ongong'a dkk, 2010:620). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan terintegrasi dapat diaplikasikan untuk semua mata pelajaran di kelas. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan belajar mengajar dan juga mempermudah siswa untuk memahami mata pelajaran di kelas.

Hakikat dari pendidikan kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada pendidikan dikelas saja. Namun pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan dalam ekstrakurikuler dan tersirat di lingkungan sekolah (Wong, Lee, Chan, dan Kennedy, 2016: 6). Pendidikan kewarganegaraan memiliki fleksibilitas sehingga dapat dilakukan dalam berbagai program. Ada tiga yang dapat dilakukan untuk menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan di integrasikan ke dalam kurikulum. 1) Tema lintas-kurikuler: dengan model ini tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari konten atau hasil pembelajaran yang ditetapkan sebagai transversal lintas kurikulum dan semua guru bertanggung jawab untuk memberikannya; 2) Di integrasi ke dalam mata pelajaran lain: dengan model ini tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari isi atau hasil pembelajaran dimasukkan dalam kurikulum mata pelajaran yang lebih luas atau bidang pembelajaran, seringkali berkaitan dengan ilmu humaniora / ilmu sosial. Mata pelajaran atau bidang pembelajaran yang lebih luas ini tidak harus

mengandung komponen berbeda yang didedikasikan untuk pendidikan kewarganegaraan. Dan 3) Subjek terpisah: dengan model ini tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari konten atau hasil pembelajaran yang terkandung dalam batas subjek yang berbeda yang didedikasikan untuk kewarganegaraan. (EACEA, 2017: 29-30). Dengan demikian ada tiga model yang dapat digunakan untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan kepada siswa.

Sekolah merupakan tempat yang tepat untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dalam cakupan yang lebih luas. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih banyak diluar pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, penting adanya perhatian khusus pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menambah pengalaman para peserta didik dengan cara memperluas pembelajaran diluar kelas. Intinya, sekolah berperan untuk mendukung pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam menciptakan warga negara yang aktif (McMurray dan Niens, 2012: 208).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin khusus di sekolah, diharapkan mampu membawa siswa untuk belajar tentang masyarakat mereka sendiri. Artinya bagaimana mereka menjadi individu yang terkait dengan masyarakat, atau bagaimana mereka mampu memaknai ketika menjadi seorang warga negara dengan memahami hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan Kewarganegaraan di sini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa agar berguna dalam masyarakat modern, seperti kemampuan untuk membentuk dan mengekspresikan pendapat sendiri, kemampuan untuk mengevaluasi kontribusi dan kinerja tokoh-tokoh publik seperti politisi dan pejabat, dan sampai

pada kemampuan memberikan kesimpulan rasional tentang apa yang benar dan salah (Frímannsson, 2001: 303).

Sekolah dan ruang kelas memiliki karakteristik berupa etos, budaya, dan iklim dapat mempengaruhi pengembangan pengetahuan anak muda tentang kewarganegaraan secara sempit dan luas, serta kecenderungan kompetensi mereka sebagai warga negara. Tiga komponen karakteristik sekolah dan ruang kelas tersebut secara luas meliputi organisasi dan manajemen kelas, kegiatan dan proyek lintas kelas dan lintas-kurikuler, sumber daya, bahan ajar, dan teknologi yang digunakan dalam proses pengajaran dan penilaian, serta hubungan antara guru dan siswa yang berkontribusi secara komprehensif dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang kewarganegaraan. Lebih jelasnya iklim sekolah sebagai lingkungan belajar yang demokratis dibangun melalui kontribusi guru terhadap etos demokratis di sekolah. Sedangkan iklim kelas adalah konsep umum yang difokuskan pada kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar, keadilan penilaian, dan dukungan sosial (Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., & Losito, B, 2009: 30).

Pentingnya iklim ruang kelas dalam pendidikan kewarganegaraan secara positif terkait dengan kinerja siswa, seperti kemauan untuk terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kewarganegaraan dan berpartisipasi sebagai pemilih yang terinformasi. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan iklim kelas dapat mempengaruhi pandangan siswa terhadap pengambilan keputusan di sekolah dan persepsi siswa tentang iklim sekolah (Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., & Losito, B, 2009: 30).

Sundström dan Fernández (2013: 106) mengenalkan istilah otonomi pribadi sebagai cita-cita dari pendidikan kewarganegaraan. Otonomi pribadi sering dianggap lebih penting daripada nilai tunggal lainnya. Otonomi mencakup banyak kualitas yang dikaitkan dengan demokrasi, seperti pemikiran kritis, kemandirian, dan kemampuan individu yang bebas menghargai. Warga negara yang otonom terlepas dari konvensi dan loyalitas sosial, dalam arti bahwa ia dapat secara terus menerus memperbaiki dan menilai kembali komitmen dan cara hidupnya.

Meskipun McCowan (2009: 25) kegiatan kelas bukanlah yang signifikan dalam membentuk warga negara. Siswa dapat belajar menjadi warga negara melalui partisipasinya dalam pengambilan keputusan di sekolah, hubungan guru-guru secara hierarkis, serta melalui teladan lembaga-lembaga politik dan pahlawan nasional. Aktivitas semacam ini tentunya akan meningkatkan kemampuan pengamatan yang dimiliki siswa sehingga menghasilkan sebuah persepsi mereka sendiri.

Dalam hal ini iklim sekolah turut membantu dalam membangun persepsi siswa. Persepsi dalam lingkup siswa dapat dibangun melalui diskusi masalah politik dan sosial dengan melihat sejauh mana pengetahuan kewarganegaraan siswa dan harapan siswa untuk menentukan pilihan ketika mereka mencapai usia dewasa (Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., & Losito, B, 2009: 31).

Untuk mengukur keberhasilan dari pendidikan kewarganegaraan yang telah berlangsung, ada tiga kerangka penilaian yang dapat digunakan dengan memberikan evaluasi. Kerangka kerja penilaian ini ditujukan melalui dimensi

konten, dimensi perilaku afektif, dan dimensi kognitif. 1) Dimensi konten yang menentukan materi pelajaran yang akan dinilai dalam konteks kewarganegaraan (berkaitan dengan aspek perilaku afektif dan kognitif); 2) Dimensi perilaku afektif, menggambarkan tipe persepsi dan aktivitas siswa yang diukur; dan 3) Dimensi kognitif, menggambarkan proses berfikir untuk dinilai (Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., & Losito, B, 2009: 26).

#### **f. Pengertian Pembelajaran PPKn**

*Civic education* dapat diartikan sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit yang berlaku sebagai mata kuliah, mata pelajaran, atau kursus di sekolah maupun universitas atau lembaga formal lainnya. Berbeda dengan *civic education*, *citizenship education* mempunyai arti yang lebih luas yang mencakup Pendidikan Kewarganegaraan didalam maupun diluar sekolah. Hal ini bertujuan untuk membekali peserta didik agar menjadi warganegara yang mandiri dan baik, serta memfasilitasi proses pendewasaan mereka sebagai warga negara (Dogonay, 2012: 35-36).

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Cogan (1999:5) menyimpulkan bahwa *citizenship education* lebih luas cakupannya dibandingkan dengan *civic education*. *Civic education* merupakan bagian penting yang ada dalam *citizenship education*. Dari sinilah istilah *civic education* berasal yang kemudian menjadi mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik. Lebih lanjut, *civic education* juga berhubungan dengan individu dan sosial politik, antara diri sendiri dan orang lain (Ross, 2012:8).

Sedangkan berdasarkan pernyataan dari Somantri (1976:54) Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang hakikatnya adalah pendidikan politik, tetapi diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif pendidikan di sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga dan semua aspek tersebut diproses untuk melatih pelajar-pelajar untuk berpikir kritis, analitis serta bersikap dan bertindak secara demokratis dalam mempersiapkan hidup yang demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berkaitan erat dengan pendidikan politik sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya pengertian dari PPKn adalah aspek pendidikan politik yang materinya fokus pada peran warga negara dalam kehidupan bernegara dan semua diproses untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin, 2004:10).

Pengertian PPKn dari sudut pandang yang lain adalah upaya pembelajaran untuk membentuk warga negara yang baik, dengan cara memiliki penalaran baik secara moral dalam bertindak maupun tidak bertindak pada urusan umum ataupun khusus. Maka PPKn tidak bisa dilepaskan dengan moralitas dan keutuhan dalam pembangunan karakter warga negara. Dalam hal ini PPKn membutuhkan dasar akademik yang kuat pada materinya seperti kewargaan, sejarah kebangsaan, pemerintahan, ketrampilan sosial, keterampilan komunikasi, dan melek politik. (Samsuri, 2011:19)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran yang fokus terhadap pembentukan dari masyarakatnya yang mengetahui serta dapat melakukan hak dan kewajibannya menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, dan terampil dan diamankan oleh UUD 1945 dan Pancasila.

Akan tetapi menurut (Balitbang Puskurbuk Kemdibud: 2012) salah satu pertimbangan PKn berubah kembali menjadi PPKn adalah karena pada pada kurikulum 2006, Pancasila tidak dimunculkan secara eksplisit sehingga (seolah) hilang dalam Kurikulum PKn walau ada pokok bahasa yang khusus membahas tentang Pancasila, hanya porsinya sedikit. Oleh karena itu, saat ini Pancasila dimunculkan kembali untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila, tidak mengadopsi secara mentah-mentah nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan versi Barat (Amerika) yang membuat kondisi demokrasi di Indonesia keablasan seperti saat ini. Masuknya kembali Pancasila sebagai bagian dari perubahan mata pelajaran PKn menjadi PPKn adalah sebagai bagian dari penguatan 4 (empat) pilar kebangsaan yang meliputi: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat pilar tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain, dan kesemuanya dijiwai oleh Pancasila.

Pembelajaran PPKn mengajarkan tentang pembelajaran karakter dari warga negara yang berisi dari nilai-nilai. Seperti yang diungkapkan oleh Kartika (2016:16) pembelajaran PPKn di SMA Dwijendra menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan tugas. Dalam mengembangkan karakter serta sikap nasionalisme peran dari guru PPKn melalui pembelajaran di kelas dan diluar kelas

seorang guru menjadi panutan bagi peserta didik apabila mampu menerapkan perilaku positif serta melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru PPKn.

Dalam lingkungan sekolah dan kelas, siswa juga mengalami proses demokrasi yaitu ketika pendidikan kewarganegaraan transformatif diterapkan. Oleh sebab itu, mereka lebih mampu memahami kepercayaan demokratis dan nilai-nilai yang bertujuan untuk mengidentifikasi budaya dan komitmen. Di lingkungan sekolah, pengetahuan yang diajarkan dan disampaikan pada sebuah kurikulum perlu diubah untuk mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan transformatif. Kesenjangan dan perbedaan pada sebuah masyarakat tidak disampaikan secara transformatif di ruang kelas dan sekolah yang transformatif. Pendidikan kewarganegaraan transformatif membantu siswa untuk mengembangkan budaya reflektif, identifikasi nasional, regional dan global serta bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempromosikan keadilan sosial di masyarakat, bangsa, dan dunia (Bank, 2008:9-10).

Sementara itu, pertimbangan pendidikan kewarganegaraan sebagai pembenaran atas multikultural fragmentasi bermanfaat pada dua pengertian berikut. Pertama, banyak pendidikan kewarganegaraan lebih fokus pada otonomi atau patriotisme. Yang paling utama adalah memperhatikan keseimbangan politik dengan serius. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan kepada anak-anak sikap toleransi yang mungkin kurang penting daripada merusak penyebaran intoleransi, serta mencegah pemahaman batas sektarian di antara kelompok budaya. Stabilitas

politik saja tentu tidak membantu menjawab pertanyaan mengenai batas toleransi atau mengenai peran-peran yang seharusnya diberikan oleh otonomi yang tampil pada kegiatan pendidikan kewarganegaraan. Akan yang lengkap tentang pendidikan kewarganegaraan akan diperiksa lebih detail dari kedua tujuan yang ingin dicapai dan metode apa yang dapat digunakan untuk mencapainya. Kedua, koreksi akan membantu jika kegagalannya membantu meredakan keberatan umum yang dimiliki kerap disampaikan pada multikulturalisme sebagai kebijakan umum, yang berarti pendukungnya gegabah mengenai efeknya pada keseimbangan politik. Kaum konservatif dan republikan sama-sama mempunyai alasan yang bagus untuk bersikap ragu-ragu tentang dampak transformatif multikulturalisme pada komunitas politik, tetapi ini bukanlah alasan yang harus didukung kaum liberal (Shorten, 2010:71-72).

Model pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation merupakan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk mempelajari suatu pengetahuan, dengan menyelidiki suatu masalah yang menggunakan pemikiran kreatif sehingga siswa mendapatkan informasi secara mandiri (Slavin, 2008). Berdasarkan hasil penelitian dari Alfiati dan Trisiana, (2017:17) bahwa: (1) penerapan oleh guru PPKn yang membentuk karakter peserta didik sebagai upaya untuk mendukung kegiatan revolusi mental di SMPN 4 Karanganyar Klaten melalui berkembangnya sikap yang penting dari teori PPKn dengan *civic disposition* sebagai kompetensi yang ada didalam Pasal (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam mengembangkan dan membentuk watak atau karakter, (2) kendala yang dihadapi berupa kurang efektif dalam mengembangkan

nilai-nilai kehidupan yang dianggap tidak penting dari kepribadian, belum adanya pemerintahan yang baik dan perusahaan dari pemerintah yang baik serta minimnya mutu dari penegak hukum.

Apabila peran dari guru PPKn dalam membina karakter kewarganegaraan siswa berjalan dengan baik maka perlu dilakukan secara terus menerus sehingga menghasilkan budaya sekolah. Seperti dalam pandangan Muslich (2011:81) bahwa budaya yang ada di sekolah adalah karakter, watak, ciri khas dan citra dari sekolah tersebut dalam pandangan masyarakat. Maka dari itu perlu dikembangkan serta pembinaan karakter di sekolah sebagai aktualisasi dari budaya yang ada di sekolah merupakan hal yang penting dari pembentukan karakter siswa supaya berjalan dengan efektif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan PPKn dalam pembinaan karakter kewarganegaraan dengan menggunakan metode pengajaran selain itu peran dari guru juga berpengaruh sebagai contoh bagi peserta didik. Jadi tidak pengajaran saja melainkan attitude dari guru juga sangat berpengaruh dalam membina karakter siswa.

## **2. Konsep Pendidikan Karakter**

Pada bagian ini akan membahas tentang pengertian pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, fungsi pendidikan karakter, nilai pendidikan karakter dan pendidikan karakter kewarganegaraan.

### **a. Pengertian Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter bukanlah pembahasan yang baru pada dunia pendidikan. Dengan perkembangan IPTEK sekarang ini, membekali anak dengan

pengetahuan pendidikan karakter merupakan langkah yang tepat untuk diterapkan oleh lingkungan sekolah dan keluarga.

Seperti yang dikutip penulis dari buku Thomas Lickona yang menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Secara lebih luas, dia menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan (Lickona, 2015:6). Selain itu, Thomas Lickona juga berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah usaha secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sosial untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Terminologi pendidikan karakter ini mulai dikenalkan sejak tahun 1900-an.

Selain mengetahui tentang arti tentang pendidikan karakter, kita juga perlu mengetahui tentang arti atau pengertian dari karakter itu sendiri. Thomas Lickona mengutip pengertian karakter dari seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles yang mengartikan bahwa karakter yang baik adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang dan orang lain. Pendapat Aristoteles tersebut menunjukkan bahwa karakter seseorang dapat dilihat dari cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Lebih lanjut, Aristoteles mengingatkan kita perihal apa saja yang sering dilupakan di masa sekarang ini: kehidupan yang berbudi luhur termasuk kebaikan yang berorientasi pada diri sendiri (seperti kontrol diri dan moderasi) sebagaimana halnya dengan kebaikan yang berorientasi

pada hal lainnya (seperti kemurahan hati dan belas kasihan), dan kedua jenis kebaikan ini berhubungan. Pernyataan diatas berarti bahwa kita perlu untuk mengendalikan diri kita sendiri keinginan kita, hasrat kita untuk melakukan hal yang baik bagi orang lain (Lickona, 2015:81).

Selain pendapat dari Aristoteles tersebut, seorang filsuf kontemporer bernama Michael Novak juga memaparkan tentang pengertian karakter menurut sudut pandangnya. Menurut Michael Novak, karakter adalah campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religious, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah. Seperti pendapat Novak tersebut, di dunia ini tidak ada seorangpun yang memiliki semua kebaikan-kebaikan tersebut, dan setiap orang pasti memiliki kelemahan masing-masing. Misalnya, orang dengan karakter yang baik dan sering mendapat pujian pun dipandang mempunyai kebaikan yang berbeda dari satu orang dengan yang lainnya. Berdasar pada pemahaman tersebut, Thomas Lickona bermaksud untuk memberikan suatu cara tentang karakter yang tepat bagi pendidikan nilai yaitu: karakter terdiri dari nilai operatif, nilai dalam tindakan. Menurut Lickona, karakter yang baik adalah terdiri dari beberapa hal, yaitu mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan suatu kehidupan moral; ketiganya ini membentuk kedewasaan moral (Lickona, 2015:81-82).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, komponen karakter yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut: pengetahuan moral, berisi tentang kesadaran

moral, penentuan perspektif, pemikiran moral, pengambilan keputusan pengetahuan nilai moral, dan pengetahuan pribadi. Perasaan moral, berisi tentang hati nurani, empati, harga diri, kendali diri, mencintai hal yang baik, dan kerendahan hati. Sedangkan tindakan moral berisi tentang keinginan, kompetensi, dan kebiasaan (Lickona, 2015:84). Selain itu, Thomas Lickona juga menyebutkan sepuluh kebaikan (karakter) esensial dan utama yang harus ditanamkan kepada peserta didik baik di sekolah, di rumah, dan di komunitas atau masyarakat, meliputi: kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, kendali diri, kasih, sikap positif, kerja keras, integritas, rasa syukur, kerendahan hati (Lickona, 2015:280). Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Samsuri (2011:8) bahwa pendidikan karakter yang ideal ialah memiliki kesadaran secara global dan bertindak dalam konteks lokal.

Ketika seseorang disebut memiliki karakter yang baik dan karakter yang biasa digunakan, orang tersebut juga akan mempunyai kualitas diri yang lain seperti kepercayaan, integritas, kemauan, dan dapat diandalkan (Pike, 2010:312). Pendidikan karakter merupakan sebuah disiplin yang tumbuh yang mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan perilaku peserta didik (Berkowitz & Hoppe, 2009:132).

Pendidikan karakter merupakan penciptaan lingkungan sekolah yang membantu siswa dalam perkembangan etika, tanggung jawab melalui model, dan pengajaran karakter yang baik melalui nilai-nilai universal (Berkowitz & Bier, 2005:7). Dengan kata lain, pendidikan karakter adalah usaha untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang norma dan nilai yang berlaku

dimasyarakat sehingga membentuk watak dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter ialah sesuatu yang dilakukan oleh guru supaya karakter peserta didik dapat di pengaruhinya (Puspitasari, 2014:88). Karakter dan kepribadian merupakan konsep dasar dari ilmu tentang individu (Konrad, 2017:56). Dengan kata lain, pendidikan karakter berguna untuk menumbuhkan serta memfasilitasi nilai-nilai yang berkembang dengan nilai-nilai yang telah ada sebelumnya di masyarakat. Selain itu, pendidikan karakter juga membantu anak untuk merefleksikan, mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar serta menerapkan nilai-nilai yang telah dimiliki (Samsuri, 2011:8).

Dari perspektif Almerico, (2014:1) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan menentukan sikap yang benar dalam berbagai situasi di lingkungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan tiap individu yang mampu memahami nilai moral dan memilih untuk melakukan hal-hal yang benar. Dari uraian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa pentingnya mengimplementasikan pendidikan karakter adalah untuk membuat hubungan kritis antara pelajaran simpati sosial dikelas dan berbuat kebaikan dalam kehidupan (Cooley, 2008:203).

#### **b. Tujuan Pendidikan Karakter**

Secara garis besar, tujuan pendidikan karakter menurut Thomas Lickona pada dasarnya adalah untuk membimbing para generasi muda menjadi cerdas dan membentuknya untuk memiliki perilaku yang baik dan berbudi (Lickona, 2015:7). Menyadari bahwa cerdas dan berperilaku baik bukanlah hal yang berbeda, para ahli filsuf pada masa Plato membuat suatu kebijakan tentang

pendidikan moral yang dibuat sebagai bagian penting pada pendidikan sekolah. Mereka telah mendidik karakter masyarakat sederajat dengan pendidikan intelegensi, mendidik kesopanan sederajat dengan pendidikan literasi, mendidik kebajikan sederajat dengan pendidikan ilmu pengetahuan. Mereka pun telah mencoba untuk membentuk masyarakat yang dapat menggunakan intelegensi mereka untuk memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi dirinya sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang membangun kehidupan yang lebih baik (Lickona, 2015:8). Ada beberapa tujuan pendidikan karakter yang perlu diketahui. Pertama, pendidikan karakter fokus pada model pengajaran langsung. Model pengajaran ini berasal dari filsafat Aristorelian yang menekankan pada penanaman nilai-nilai yang ada di masyarakat kepada anak-anak. Kedua, pendidikan karakter fokus pada model pengajaran tidak langsung. Hal ini fokus pada pemahaman anak dan perkembangan sosial-moral mereka yang mampu membentuk hubungan personal dengan teman sebaya yang harus diperhatikan dan dibimbing oleh orang dewasa. Ketiga, pendidikan karakter fokus pada pengembangan kelompok atau komunitas. Model pendidikan ini fokus pada lingkungan sekitar dan hubungan kepedulian terhadap pembangunan kelompok-kelompok moral (Williams, 2000:36).

Tujuan dari pendidikan karakter membentuk bangsa Indonesia yang berakhlak mulia, toleran, tangguh, berjiwa patriot, gotong royong, serta berorientasi terhadap IPTEK hal tersebut dapat dimaknai dengan iman dan takwa kepada Tuhan YME yang berlandaskan Pancasila (Maunah, 2015:19). Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantoro dilakukan dengan model Ing

Ngarso Sing Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Dengan kata lain, contoh dalam pendidikan karakter diperlukan guna mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Contoh seorang pemimpin nasional dalam lingkup umum maupun privat adalah syarat dari berhasil tidaknya membangun karakter warga negara yang baik (Samsuri, 2011:90). Sebaliknya, penurunan statistik terhadap moral pada masyarakat Amerika menyebabkan mayoritas masyarakatnya meragukan akan pentingnya pendidikan karakter (DeVitis & Yu, 2011: 96).

Secara umum, tujuan pendidikan karakter erat kaitannya dengan usaha pembangunan bangsa dan negara yang lebih maju dengan memfokuskan pada watak/karakter warganegara. Selain itu, pendidikan karakter di Indonesia adalah gerakan nasional untuk mengadakan sekolah yang mampu mencetak generasi penerus yang beretika dan bertanggung jawab karena pendidikan karakter lebih fokus pada aspek nilai yang universal/umum. Kamarudin (2012:31) menyatakan pendidikan karakter tidak selalu mengajarkan tentang yang benar dan salah kepada anak, tetapi pendidikan karakter menanamkan kebiasaan kepada peserta didik tentang sesuatu yang baik dan dapat dipahami, dapat dirasakan, serta mau untuk melakukan kebaikan. Salah satu cara untuk melatih kewarganegaraan siswa adalah dengan melalui penanaman moral dan pendidikan karakter. Selain tujuan tersebut, penerapan dari pendidikan karakter adalah memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik (Russel & Waters, 2010:14). Hasil positif dari penerapan program pendidikan karakter disekolah adalah meningkatnya prestasi peserta didik, berkurangnya skorsing atau pengeluaran siswa dari sekolah, dan

menurunnya resiko perilaku peserta didik (Agboola & Tsai, 2012:63). Dengan kata lain, pendidikan karakter dapat tercapai sesuai dengan dukungan dari sistem pendidikan nasional, pemerintah mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas tersebut (Fathurahman, 2012:98). Oleh sebab itu, peran serta seluruh civitas akademika di sekolah harus saling bekerjasama demi terwujudnya pendidikan karakter pada peserta didik disekolah. Fungsi sekolah sebagai tempat dimana peserta didik dapat berlatih nilai-nilai kebaikan dan melampaui kehidupan sekolah mereka (Milliren & Messer, 2009:29). Selain itu, tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk mengurangi masalah perilaku peserta didik serta meningkatkan prestasi akademik siswa di sekolah (Katilmis dkk, 2011:76).

### **c. Fungsi Pendidikan Karakter**

Pada era sekarang ini banyak bermunculan anak-anak dengan kesadaran moral yang rendah, menurut guru-guru mereka hal tersebut dikarenakan mereka berasal dari keluarga yang bermasalah. Tentunya saja kurangnya perhatian orang tua menjadi alasan utama bagi sekolah untuk secara terpaksa harus terlibat dalam pendidikan karakter (Lickona, 2015:5). Dewasa ini, bermunculan berbagai perdebatan serius di sekolah-sekolah yang memfasilitasi peserta didik dengan pendidikan karakter. Salah satu topik utama dalam bidang pendidikan saat ini adalah pendidikan nilai. Pendidikan moral yang berlaku di sekolah banyak diragukan oleh beberapa pihak. Namun perbedaan pendapat tersebut hanya berkembang secara stagnan dan risikonya adalah tidaklah etis jika sekolah mulai bertindak ketika masyarakat sudah berada dalam keterpurukan moral. Sebaiknya,

sekolah melakukan sesuatu sebagai kontribusi lebih kepada anak-anak muda dan juga bagi kesehatan moral dari bangsa ini (Lickona, 2015:6).

Pembinaan karakter sebagai usaha pengembangan sumber daya manusia yang unggul memiliki arti sebagai pendidikan karakter berbasis potensi diri yang merupakan proses kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya harmoni yang selalu mengajarkan, membimbing dan membina setiap manusia untuk memiliki kompetensi intelektual (cognitif), karakter (affective) dan kompetensi keterampilan mekanik (psicomotoric) (Khan, 2010:4).

Karakter warga negara yang diharapkan sesuai dengan pendidikan karakter adalah: (1) mendukung segala kebaikan bersama dan kesejahteraan publik, (2) mengakui persamaan nilai moral dan martabat kemanusiaan setiap individu; (3) menghargai dan melindungi persamaan hak-hak setiap individu; (4) berpartisipasi dan bertanggung jawab secara efektif dalam kehidupan politik dan kewargaan; (5) bertanggung jawab terhadap kepentingan pemerintahan melalui persetujuan pihak-pihak lain; (6) menjadi individu yang dapat mengendalikan diri sendiri dengan menimplementasikan keutamaan kewargaan; (7) menumbuhkembangkan prinsip-prinsip demokratis (Hoge, 2002: 104)

Dari beberapa masalah di atas, dapat dilihat pentingnya pendidikan karakter pada saat ini. Hal tersebut karena karakter akan meunjukkan jati diri kita sebenarnya, karakter akan menentukan seseorang membuat keputusan, karakter menentukan cara bersikap, perkataan dan perbuatan seseorang. Dengan demikian, orang yang memiliki karakter baik maka perkataan dan perbuatannya secara

otomatis juga akan baik. Sehingga semua itu akan menjadi identitas yang melekat dan merepresentasikan dirinya dan membuat seseorang mudah dibedakan dengan identitas lainnya. Seperti fungsi dari pendidikan karakter adalah: (1) mengembangkan potensi dasar supaya berpikiran baik, berhati baik dan berperilaku baik, (2) mempekat dan memperkuat pembangunan tingkah laku bangsa yang multikultural, (3) meningkatkan peradaban yang kompetitif terkait dengan pergaulan dunia (Puspitasari, 2014:45).

Perspektif dari Zubaidi (2011: 18) fungsi pendidikan karakter pada dasarnya adalah untuk membentuk dan mengembangkan pribadi warganegara menjadi lebih baik agar mampu bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Negara yang mempunyai warganegara dengan karakter yang kuat, akan lebih mudah untuk menjadi negara maju. Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi dalam pendidikan karakter siswa supaya berperilaku baik, berpikiran positif, dan berhati baik supaya sesuai dengan falsafah pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Peran dari pendidikan karakter memperbaiki peran dari keluarga, pendidikan, masyarakat, dan pemerintahan yang bertujuan untuk ikut berpartisipasi serta bertanggung jawab atas pengembangan dari warga negara dan pembangunan untuk kemajuan bangsa indonesia, yang mandiri dan sejahtera. Yang ketiga ialah fungsi penyaring.pendidikan karakter dapat menyaring budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan kaidah nilai budaya dan karakter bangsa, dan lebih memilih budayanya sendiri.

#### **d. Nilai Karakter**

Nilai pendidikan karakter adalah tingkah laku keseharian yang diajarkan terhadap siswa bisa melalui pembelajaran di kelas, lingkungan sekolah, atau kegiatan yang ada di sekolah. Berikut ini adalah nilai-nilai dalam pendidikan karakter dari Kemendiknas 2010 yaitu: (1) jujur, (2) religius, (3) toleransi, (4) kreatif, (5) disiplin, (6) kerja keras, (7) demokratis, (8) rasa ingin tahu, (9) mandiri, (10) cinta tanah air, (11) semangat kebangsaan, (12) cinta damai, (13) bersahabat/komunikatif, (14) menghargai prestasi, (15) peduli lingkungan, (16) peduli sosial, (17) tanggung jawab, (18) gemar membaca. Hal ini senada dengan pendapat dari Lee (2014: 345) bahwa nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan adalah: menghargai keberanian, peduli terhadap sesama, tanggung jawab, kooperatif, kejujuran dan menghargai. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat perubahan positif terhadap hubungan sosial dan sikap anak-anak ketika 6 nilai-nilai karakter inti ini diintegrasikan ke dalam aktivitas kelas.

Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai karakter pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAM Klaten. Hasil dari penelitian tersebut merupakan penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MAM Klaten. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mempersiapkan RPP sebagai rencana pembelajaran yang mencantumkan nilai-nilai karakter yang akan dicapai, mempersiapkan media pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang interaktif dikelas, memberikan penilaian atau evaluasi berupa penilaian sikap (afektif) menggunakan skala sikap yang dilihat dari berbagai kegiatan belajar mengajar di kelas atau di luar kelas dalam kegiatan

ekstrakurikuler maupun kegiatan di madrasah dan pondok pesantren. Selain itu, penilaian pengetahuan (kognitif) dilakukan melalui ulangan dan ujian. Sedangkan hambatan yang dihadapi pada penanaman nilai karakter dalam pembelajaran PPKn adalah sikap malas dari beberapa siswa (Sayektiningsih dkk, 2017:228).

Nilai karakter yang diajarkan terhadap budaya pesantren yaitu yang berhubungan dengan Tuhan: iman, taqwa, dan ikhlas. Sedangkan nilai karakter berhubungan dengan: tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, kemandirian, percaya diri, disiplin, ingin tahu dan kreatif. Selain itu, nilai karakter yang berhubungan dengan sesama yaitu: kerja sama, patuh pada peraturan, dan sopan santun. Nilai karakter yang berhubungan dengan lingkungan yaitu: cinta kebersihan dan peduli sosial. Nilai karakter yang berhubungan dengan kebangsaan: menghargai keberagaman. Metode pendidikan karakter yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pembiasaan, pemberian nasehat, keteladanan, praktek serta *reward and punishment* (Sutrisno, 2017:509).

Metode pendidikan karakter yang digunakan oleh pembina pramuka di MAN 1 Yogyakarta yaitu menggunakan musyawarah ambalan dan musyawarah sanggah kerja. Dari kegiatan musyawarah tersebut, banyak karakter yang dapat dibentuk, antara lain keberanian, kekeluargaan, toleransi, dan mengutarakan pendapat. Disamping itu, terdapat tiga pilar pendidikan kepramukaan yang wajib diperhatikan, yaitu modern yang berarti mengikuti perkembangan, asas manfaat dan asas taat pada kode kehormatan. Melalui pilar-pilar tersebut diharapkan dapat mengembangkan karakter dan watak siswa (Putri, 2017:436).

#### **e. Pendidikan Karakter Kewarganegaraan**

Peran dari PPKn sebagai mata pelajaran yang ada di sekolah yang mengajarkan tentang sifat dan karakter dari warga negara serta perannya mempunyai karakter yang sama seperti bidang studi yang diajarkan di sekolah, materi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pandangan (Branson, 1999:8) terdapat tiga komponen, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Pertama, *civic knowledge* adalah nilai yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Didalam aspek ini terdapat kemampuan akademik keilmuan yang dapat dikembangkan dari teori-teori maupun konsep politik, moral dan hukum. Oleh karena itu, mata pelajaran PPKn adalah bidang kajian multidisipliner yang telah terperinci, materinya berisi tentang pengetahuan kewarganegaraan meliputi hak dan tanggung jawab warga negara, prinsip dan proses demokrasi, hak asasi manusia. Kedua, *civic skill* ialah ketrampilan intelektual dan ketrampilan berpartisipasi yang dilaksanakan didalam kehidupan bernegara. Ketiga, *civic disposition* atau sifat, watak maupun karakter kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan dipandang sebagai akar dari pengembangan dimensi sebelumnya. Karakteristik PPKn ditekankan pada karakter, sikap, watak serta potensi yang bersifat afektif.

Ada beberapa penjelasan mengenai karakter demokratis warga negara yang senada dengan karakter masyarakat kewargaan berdasarkan pendapat Branson (1999: 23-25) bahwa karakter kewarganegaraan sejalan dengan sistem demokrasi dan memiliki sifat individu atau umum yang baik untuk dikembangkan dalam masyarakat demokrasi. Beberapa karakter tersebut antara lain: menjadi masyarakat yang independen, melengkapi tanggung jawab individu

kewarganegaraan dalam lingkup ekonomi dan politik, ikut serta dalam kepentingan kewarganegaraan dengan efektif dan bijaksana, menghargai harkat dan martabat kemanusiaan setiap orang, dan menumbuhkembangkan bergunanya demokrasi serta konstitusional yang sehat. Selanjutnya, karakter warga negara yang baik yang mempunyai karakter demokrasi, warga negara yang baik, dan terdapat beberapa indikator penyebutannya. Apabila dilihat dari bagian Pendidikan Kewarganegaraan demokrasi berdasarkan Patrick (1999:33) keempat komponen tersebut adalah (1) ilmu tentang kewarganegaraan dan pemerintahan demokrasi; (2) kemampuan kognitif dari kewarganegaraan demokratis; (3) kemampuan ikut serta dari kewarganegaraan demokratis dan (4) urgensi karakter kewarganegaraan yang demokratis.

Pembentukan karakter demokratis warga negara penting sebagai modal sosial dan modal intelektual. Modal intelektual ini berfungsi untuk membentuk warga negara yang mempunyai sikap tanggung jawab, yaitu mempunyai ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktik demokrasi dan kemampuan kognitif guna mengimplementasikan ilmu tersebut terhadap kepentingan umum. Selain hal tersebut, pentingnya modal intelektual dikarenakan ia mempunyai hubungan yang positif dengan urusan-urusan lain dari negara yang baik, contohnya toleransi politik dan kepedulian pada politik umum (Patrick, 1999: 45) dalam pembentukan karakter yang dilakukan di pondok pesantren Faktor pendukung dalam kehidupan pondok pesantren adalah kebijakan pengelola pondok pesantren, lingkungan dalam pondok pesantren, fasilitas pondok

pesantren, dukungan dari pengajar atau ustad/ustadzah, dan dukungan dari pengurus IPM (Sutrisno, 2017:509).

Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran harus dipersiapkan dengan baik. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam tahap perencanaan guru harus mempersiapkan materi, metode, media, sumber belajar, tahapan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter tersebut. Hal tersebut secara tidak langsung membantu mengembangkan macam-macam karakter yang telah ditetapkan (Dianti, 2014:68).

Pendidikan karakter dalam budaya pesantren sudah banyak diterapkan di berbagai sekolah termasuk pondok pesantren. Di pondok pesantren Ihyaul Ulum Gilang Babat dan pondok pesantren Langitan Widang Tuban, ada beberapa pendidikan karakter yang diterapkan kepada santri, diantaranya keteladanan kyai, interaksi yang baik dan terus-menerus yang dilakukan oleh santri kepada santri yang lain, santri dengan pengurus dan pengasuh dengan semua santri. Yang terakhir, adanya peraturan atau tata tertib yang berguna untuk melindungi kebijakan pondok, kebijakan atas dasar kehendak kyai serta visi misi pesantren (Zuhriy, 2011:307).

Sama halnya dengan budaya di MAN 1 Yogyakarta terlihat dari pengembangan sekolah yang membangun, memelihara dan mengembangkan budaya positif dari bangsa dalam pendidikan yang menyeluruh. Jika semua elemen sekolah dilibatkan dalam proses pendidikan karakter, itu berarti seluruh norma, kebiasaan, dan nilai karakter yang telah diutamakan harus mampu

dimasukkan dalam proses pembelajaran, ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Proses yang efektif untuk membangun budaya sekolah seharusnya memang melibatkan semua pihak, baik guru ataupun siswa untuk bersama-sama berkomitmen mewujudkannya (Putri, 2017:439).

Peran pesantren sebagai situs kewarganegaraan dalam membentuk budaya kewarganegaraan di Madura, muncul di bidang pendidikan, sosial, dan politik melalui penanaman nilai-nilai agama dan nasional, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan politik. Semua itu disuarakan pada nilai-nilai agama yang menjadi ciri pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam (Muwafiq dan Samsuri, 2017:183).

Kegiatan pembelajaran pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dilakukan dengan berkemah, kegiatan di ruang terbuka, melakukan permainan yang menarik dan menyenangkan, serta melakukan pengembaraan. Di SMPN 1 Yogyakarta pembina pramuka menggunakan beberapa metode yang diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya yaitu kegiatan dengan sistem among yang memeberikan pengajaran tentang bagaimana orang menjadi panutan atau teladan dan bagaimana cara untuk memotivasi siswa. Selain itu Kiasan Dasar digunakan pada ekstrakurikuler pramuka digunakan untuk memberikan pendidikan karakter kepada siswa yang bertujuan memberikan pendidikan karakter siswa agar memiliki semangat perjuangan dan motif budaya yang jelas. Hal tersebut bertujuan agar siswa memiliki karakter cinta tanah air dengan mengembangkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia (Aji, 2016:93).

Pembentukan karakter di pondok pesantren lebih mudah karena para santri melakukan kegiatan bersama selama 24 jam. Dengan kata lain, mereka lebih cepat beradaptasi dan membaaur dengan yang lain. Namun, bagi santri yang baru masuk pondok, mereka terlihat masih kaku karena sulit beradaptasi. Tapi, seiring berjalannya waktu mereka akan saling membaaur dengan santri yang lain. Karena sistem pendidikan pada ekstrakurikuler pramuka adalah kekeluargaan, maka hal tersebut menjadi dasar utama dalam kegiatan pramuka di MAN 1 Yogyakarta dimana setiap agenda kegiatan yang dilaksanakan akan mengikutsertakan seluruh pihak yang berada disekolah, hal ini dilakukan dengan memberikan jadwal kepada guru untuk ikut serta dalam kegiatan pramuka (Putri, 2017:439).

### **3. Konsep Pendidikan Multikultural**

Pada bagian ini akan membahas tentang pengertian pendidikan multikultural, tujuan pendidikan multikultural, nilai pendidikan multikultural, dan karakter kewarganegaraan multikultural.

#### **a. Pengertian Pendidikan Multikultural**

Konsep multikultural mempunyai 16 sejarah yang berbeda disetiap negara. Negara pertama yang menerapkan konsep multikultural adalah Kanada. Perspektif dari Race, (2011:5) Kanada merupakan negara pertama di dunia yang mengadopsi multikulturalisme sebagai peraturan resmi pada tahun 1971. Dengan kata lain, konsep multikultural telah berkembang dinegara-negara barat sejak lama. Hal ini menarik untuk dibahas mengingat di era sekarang ini pemahaman mengenai multikulturalisme sudah mulai pudar, sehingga dibutuhkan pemahaman mengenai pendidikan multikultural yang bisa dimulai dari bangku sekolah. Walaupun ada

banyak bentuk dari multikulturalisme, secara umum, adalah sebuah alternatif untuk asimilasi mental yang memunculkan adanya perbedaan budaya pada sebuah negara, dan situasi ini menandakan adanya masyarakat yang menciptakan ruang bagi perbedaan kebudayaan tumbuh di lingkungan mereka (Aydin, 2013:31). Pembelajaran tentang pendidikan multikultural seharusnya dibiasakan sejak dini. Hal ini karena budaya itu hidup, berubah dan berkembang secara terus-menerus (Karacabey dkk, 2019:384).

Pandangan Skeel dalam Ibrahim, (2013:15) konsep dari pendidikan multikultural adalah memandang suatu sikap tentang keunikan manusia yang berada dalam interaksi sosial tanpa membedakan ras, kultur, kondisi jasmaniah, kebiasaan seks atau status ekonomi. Sebenarnya multikulturalisme adalah konsep yang dilakukan dimana sebuah komunitas berada dalam konteks kebangsaan serta dapat menerima dan menghargai perbedaan, keberagaman, kemajemukan, ras, budaya, agama, etnis, dan suku (Misbahudholam, 2016:90). Sejalan dengan itu, Tilaar dalam Misbahudholam (2016:95) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses tentang penanaman cara hidup untuk menghormati, tulus serta toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di antara masyarakat plural. Perspektif dari multikultural adalah menghargai keberagaman yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Pendidikan multikultural merupakan sebuah bentuk pendidikan dimana budaya dari siswa diintegrasikan ke dalam kurikulum, diinstruksikan, dan diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah. Dengan demikian, pendidikan multikultural diharapkan dapat mendorong konsep dari budaya, perbedaan,

persamaan, keadilan sosial dan demokrasi kedalam lingkungan sekolah Gollnick & Chinn (2017:174). Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa keanekaragaman sosial dan budaya berbeda dari pendekatan multikultural. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup pendekatan multikultural berada diluar area dari dasar sipil dan kebebasan politik yang diasosiasikan dengan kebebasan kewarganegaraan yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan kewarganegaraan yang komunitas tertentu untuk mengekspresikan jati diri mereka (Iverson, 2011: 145). Selanjtnya, pendidikan multikultural adalah sebuah bidang keilmuan yang membantu siswa mencapai pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi untuk masyarakat demokratis dan ini berasal dari perbedaan kebudayaan yang bertujuan mencapai persamaan kesempatan dalam pendidikan (Halvorsen & Wilson, 2010:731). Pendapat lain juga dikemukakan oleh Horst and Pihl (2010:103) bahwa interkulturalisme menekankan pada dialog interkultural dan penyertaan sosial yang merupakan persyaratan dasar untuk mempunyai sebuah masyarakat yang tidak bias dan tidak mendiskrimasi.

Selanjutnya, pendidikan multikultural menggabungkan gagasan atau pemikiran bahwa semua siswa apapun ras, etnis, kelas sosial, atau karakteristik budayanya, harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan multikultural penting untuk diterapkan disekolah mengingat ada banyak perbedaan agama, suku dan ras. Sehingga diharapkan dengan pemahaman mengenai pendidikan multikultural tersebut, baik guru maupun peserta didik mampu menerapkan pendidikan multikultural yang sebenarnya (Banks & Banks 2010:3). Pendidikan multikultural adalah praktek

tentang pendidikan yang fokus terhadap persamaan budaya, dan kekuatan yang membutuhkan harapan pendidikan tinggi pada seluruh siswa, mementingkan sudut pandang yang beragam, orang lain, dan pandangan dunia tentang kurikulum dan membekali siswa dengan pemahaman isu kekuatan, hak istimewa, penindasan, dan gagasan tentang bagaimana mereka bekerja terhadap keadilan sosial (Castagno 2013:118). Berkaitan dengan implementasi pendidikan multikultural di sekolah, salah satu pihak yang bertanggungjawab atas hal ini adalah guru. Kewajiban utama dalam implementasi dari pendidikan multikultural yang meliputi gagasan seperti persamaan, menghargai, dan perdamaian dan juga persamaan kesempatan untuk menjadi siswa-siswa yang berhasil, adalah kewajiban guru (Aydin & Tonbuloglu, 2014:90-91).

Pandangan Davies dkk, (2005:349) pendidikan karakter didefinisikan sebagai program sekolah yang didesain dengan bekerjasama dengan komunitas institusi lain, untuk membentuk secara langsung dan sistematis, sikap generasi muda secara eksplisit mempengaruhi nilai non-relativistik yang dipercaya secara langsung untuk membawa sikap tersebut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme merupakan perkembangan terkini mengenai gagasan yang berhubungan dengan penggabungan sosial dan budaya dalam komunitas pendatang. Selain berlaku bagi komunitas pendatang, gagasan tersebut juga berlaku bagi seluruh keturunan mereka. Jadi, multukuralisme merupakan formasi baru dari keanekaragaman budaya (Reitz, 2009: 5).

#### **b. Tujuan Pendidikan Multikultural**

Tujuan pendidikan multikultural yaitu: (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beranekaragam; (2) untuk membantu semua peserta didik dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan peserta didik dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan ketrampilan sosialnya; (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun sikap ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran kepada mereka mengenai perspektif perbedaan kelompok (Banks, 1993:3). Selanjutnya, pendidikan multikultural bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan juga menciptakan keharmonisan dalam perbedaan (Misbahudholam, 2016:94). Senada dengan Skeel (1995:132) tujuan dari pendidikan yang berbasis pada multikultural dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Peran sekolah difungsikan dalam memandang keanekaragaman siswa.
- b. Membantu siswa untuk membangun tingkah laku yang positif terhadap perbedaan kultur, agama, ras, etnik.
- c. Mengajarkan siswa tentang ketahanan mereka untuk mengambil keputusan dan ketrampilan.
- d. Memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang ketergantungan tentang kebudayaan serta memberi arahan tentang perbedaan kelompok di masyarakat.

Dengan demikian, peran guru dalam mendidik siswa tentang pendidikan multikultural menjadi sangat penting. Guru harus memahami pentingnya pendidikan multikultural dan memberikan kesempatan untuk siswa mereka untuk

belajar tentang banyak kebudayaan yang ada. Selanjutnya, guru juga dituntut untuk selalu kreatif, fleksibel, sensitif, adil, dan suportif serta menggunakan seluruh sumber nilai yang tersedia untuk para siswa (Aydin, 2012:284).

Chapman & Grant, (2010:43) menyatakan bahwa pendidikan multikultural dikembangkan berlawanan dengan gagasan tradisional tentang kemampuan belajar siswa, dinamika keluarga dari keluarga yang berbeda ras, dan lingkungan belajar serta isi kurikulum untuk semua siswa. Dengan demikian, pendidikan multikultural juga bertujuan untuk memberikan persamaan dan keadilan sosial dalam memperoleh pendidikan bagi semua peserta didik dari semua kalangan tanpa memandang suku, agama, ras mereka. Hal ini senada dengan Bolton (2010:227) yang menyatakan, semua manusia termasuk dalam ikatan budaya baik secara sosial, fisik, spiritual dan psikologi. Dengan memahami tentang konsep dari multikultural diharapkan dapat menumbuhkan cinta kepada sesama manusia serta menyadari semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, walau dari latar belakang yang beda. Sedangkan alternatif multikultural menurut Baber, (2008:167) adalah dengan mengintegrasikan dan asimilasi sekolah dengan lingkungan di sekitarnya. Diharapkan dengan integrasi konsep pendidikan multikultural di sekolah akan berdampak pada tercapainya tujuan utama dari pendidikan multikultural itu sendiri. Selain pendapat di atas, pendidikan multikultural juga bertujuan untuk meningkatkan kesiagaan terhadap semakin meluasnya keanekaragaman pada praktik dan kebiasaan kebudayaan yang berbeda-beda. Selain itu, adanya perbedaan sejarah pada setiap jaman

memunculkan rasa ragu di kalangan masyarakat umum dan menimbulkan penilaian objektif dari perseorangan (Mishra & Kumar, 2014: 64).

### **c. Nilai Multikultural**

Penanaman nilai pendidikan multikultural menjadi sangat krusial di kalangan pendidikan dikarenakan terjadinya degradasi moral generasi penerus bangsa sebagai warga negara yang memprihatinkan banyak pihak, khususnya akademisi. Peran pendidik dan lingkungan terdekat peserta didik menjadi bagian terpenting yang bisa membantu peserta didik untuk bisa mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari agar menjadikan mereka warga negara yang bermartabat. Nilai multikultural sebenarnya masih abstrak akan tetapi isinya menyerupai dari nilai-nilai moral pancasila Tim Nasional Reformasi, (1999: 123-124) yang penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara diantaranya adalah: (1) Persamaan, (2) Bersilaturahmi (3) Persaudaraan, (4) Rendah hati, (5) Adil, (6) Baik sangka, (6) Dapat dipercaya (7) Tepat janji, (8) Lapang dada, (9) Dermawan, (10) Harga diri, (11) Hemat.

Pandangan tersebut senada dengan pendapat Samsuri (2011:95) bahwa di masa yang akan datang, visi Indonesia 2020 mencakup idealitas manifestasi warga negara Indonesia yang mempunyai karakter religius, bersatu, menusiawi, sejahtera, demokratis, adil, mandiri, maju, serta baik dan bersih dalam pengelolaan negara. Visi Indonesia 2020 berbeda dengan Etika Kehidupan Berbangsa. Penerapan Etika Kehidupan Bangsa berlaku bagi seluruh warga

negara, sedangkan Visi Indonesia 2020 pelaksanaannya difokuskan kepada para penyelenggara negara. Namun, pada realitanya, baik Etika Kehidupan Bangsa maupun Visi Indonesia 2020 hanyalah sebuah “omong kosong” yang tidak jelas kapan akan dilaksanakan. Hal ini sama dengan ajaran kebajikan dalam P4 yang realita konkritnya belum jelas bisa terlaksana atau tidak (Samsuri, 2011:95). Pada kebudayaan yang beranekaragam, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat mempunyai pemahaman yang saling berhubungan, sikap toleran, pertimbangan, dan kesukaan, agar masyarakat yang damai dan makmur dapat dicapai dan juga menghindarkan masyarakat dari konflik yang berkepanjangan (Sutiyono, 2015)

Nilai-nilai multikultural yang terdapat dalam Al Quran yaitu; 1) nilai toleransi, 2) nilai demokrasi/kebebasan, 3) nilai keadilan, dan 4) nilai persamaan/kesetaraan. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada Q.S Al-Hujurat:13, Q.S Al-Baqarah: 213 dan 256, Q.S An-Nisa: 1 dan 58, dan Q.S Al-Kafirun: 1-6. Berdasarkan analisis peneliti tentang tafsir al-Maraghi, salah satu faktor penyebab adanya kerusuhan pada kehidupan sosial adalah sikap mengolok-olok orang lain. Dengan demikian dibutuhkan sikap toleransi serta tolong menolong secara adil agar tercipta kehidupan yang rukun dan humanis (Siregar dkk, 2018:160).

Nilai multikultural yang diajarkan dari pembelajaran PPKn dengan cara bisa menghargai perbedaan dan memberikan pendidikan multikultural yang terdapat proses tentang penanaman saling menghormati, tulus, dan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan dengan adanya pendidikan multikultural dalam pembelajaran PPKn mampu mengubah sikap agar tidak

mudah meremehkan, merendahkan dan melecehkan budaya atau kelompok lain, terutama kalangan minoritas (Ida Retnawati, 2016:92).

Salah satu nilai yang dijadikan sebagai dasar pada kegiatan pramuka yaitu kekeluargaan. Misalnya pada kegiatan perkemahan, dalam kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kasih sayang antara anggotanya karena mereka diharuskan untuk hidup bersama dan menjadi keluarga sementara. Melalui kegiatan pramuka akan menumbuhkan rasa kekeluargaan dengan sesama peserta didik, sehingga menambah erat kasih sayang antar sesama. Hal ini membuktikan bahwa pramuka dapat menjalin komunikasi yang baik dengan alumni sebagai kegiatan ekstra sekolah (Putri, 2017:437).

#### **d. Karakter Kewarganegaraan Multikultural**

Dimasa mendatang idealnya pendidikan karakter memuat tentang nilai-nilai kewargaan yang multikultural, yang diambil dari nilai-nilai berbangsa secara keutuhan serta dapat diterima secara umum yang terangkum dalam kebhinekaan, nilai-nilai pancasila yang diterima oleh pendiri bangsa sebagai dasar yang mengikat kehidupan bersama bangsa Indonesia. Karakter mengakui keragaman dari asal-usul warga negara merupakan syarat yang penting dalam pendidikan karakter ke depannya. Kesadaran tentang kewarganegaraan multikultural didalam pendidikan karakter tidak hanya berisi tentang muatan nilai universal yang ada didalam kelompok masyarakat yang majemuk, tetapi menghargai dan mengakui tentang nilai dari kearifan lokal yang tumbuh yang hidup didalam lingkungan kelompok masyarakat. Maka dari itu, pendidikan karakter tidak hanya mengagungkan nilai yang ada dari suatu kelompok. Tetapi pendidikan karakter

kewarganegaraan multikultural merupakan upaya dari warga negara untuk membentuk jati diri yang sadar dan peka dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan rasa melindungi, mengakui, dan menghargai keanekaragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Samsuri, 2011:101).

Subjek penelitian yang dilakukan oleh Guru-guru PPKn MA se-DIY telah menerjemahkan materi kewarganegaraan multikultural seperti yang terdapat pada dokumen MPR sebagai hasil dari identifikasi kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Materi Pancasila termasuk nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk topik Kesetaraan Hak dan Kewajiban setiap Warga Negara, Pengakuan dan Penghormatan setiap orang yang memiliki latar belakang berbeda, dan Kewajiban Negara melindungi setiap individu warga negara dengan latar belakang yang berbeda. Bhinneka Tunggal Ika berarti ada banyak keanekaragaman di Indonesia namun tetap dalam satu bingkai Indonesia. Sedangkan nilai karakter menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI (Samsuri dan Marzuki, 2016: 28).

Bahwa modal penting dalam sistem demokrasi adalah karakter kewarganegaraan, terutama modal intelektual yang seharusnya diterapkan pada kehidupan demokrasi. Modal intelektual tersebut berhubungan dengan peran warga dalam kehidupan publik dan kewarganegaraan sebagai tanda warga negara yang baik, seperti minat politik, efikasi politik dan sikap toleransi politik. Maka kehidupan bermasyarakat memerlukan adanya karakter untuk menjadi warga

masyarakat yang mandiri, memenuhi tanggung jawab individu kewarganegaraan dalam bidang ekonomi dan politik, ikut serta dalam kepentingan kewarganegaraan dengan efektif dan bijaksana, mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional dengan sehat, serta menghormati dan menghargai harkat dan martabat kemanusiaan setiap orang (Patrick (1999:45) dan Branson (1999)

Pendidikan multikultural wajib diimplementasikan pada proses pembelajaran melalui proses pembiasaan. Hal ini disebabkan karena pembelajaran multikultural dilakukan dengan pembentukan sikap, pola pikir, pembiasaan dan tindakan sehingga tumbuh kesadaran nasional. Karakter keindonesiaan meliputi: kesadaran kehormatan sebagai bangsa, kesadaran kebanggaan sebagai bangsa, kemandirian dan keberanian sebagai bangsa, kesadaran nasionalisme bangsa lain, kesadaran berkorban demi bangsa, kesadaran melawan penjajahan, dan kesadaran kedaerahan menuju kebangsaan. Terciptanya karakter keindonesiaan akan menjadi pondasi sebagai ciri khas masyarakat Indonesia yang kuat. Kuatnya keindonesiaan ini akan menjadi energi yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar di tengah percaturan bangsa-bangsa di dunia. Bangsa yang besar dapat tercipta melalui karakter manusianya yang kuat. Karakter keindonesiaan melalui pendidikan multikultural inilah salah satu harapan menuju negara Indonesia yang besar dan kuat di masa depan (Najmina, 2018:55).

Pendidikan multikultural yang terkandung dalam pelaksanaan perencanaan pembelajaran yaitu guru memiliki pedoman pembelajaran atau silabus, RPP yang sudah terintegrasi dengan nilai pendidikan multikultural, serta guru memiliki lebih dari satu buku panduan atau pegangan. Disini, peneliti bertindak sebagai observer

dan menemukan contoh pelaksanaan pembelajaran multikultural dikelas. Contohnya jika dalam pembelajaran ada siswa yang bertanya, maka tidak ada perbedaan antara siswa yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, guru telah melakukan evaluasi pembelajaran yang mengandung nilai pendidikan multikultural dengan cukup baik, yaitu dengan tidak membeda-bedakan siswa atau dengan kata lain siswa diperlakukan sama dalam proses pembelajaran dikelas. Namun, apabila terdapat siswa yang mempunyai nilai dibawah standar kelulusan (KKM) yaitu 85, maka siswa tersebut wajib mengikuti remedial dengan melakukan pengayaan terlebih dahulu (Fatimah, Kiptiah, Fajrin, 2014:570).

Pada ranah inilah pendidikan di pesantren berperan sebagai sarana penghubung dengan masyarakat menghadapi banyak tantangan dalam pengembangan pendidikan multikultural agar tercipta kehidupan yang selaras dalam segala perbedaan di dalam pondok pesantren. Adanya kesadaran multikultural dan pluralitas dalam masyarakat akan menjadikan kehidupan penuh dengan toleransi. Hal ini penting untuk diajarkan di pondok pesantren agar tercipta kehidupan yang toleran dan humanis. Karena pemahaman pendidikan pesantren yang cenderung intoleran dan eksklusif akan mengganggu kerukunan masyarakat multi-etnik dan agama. Sehingga, pandangan tentang pendidikan pesantren yang eksklusif tidak sesuai dengan era multikultural. Sebab, jika perspektifnya bersifat eksklusif dan intoleran, maka pemahaman yang diterima merupakan pemahaman eksklusif dan intoleran yang akan merusak kerukunan antar agama dan sikap menghargai kebenaran agama lain (Kasdi, 2012: 220).

Adanya kontak fisik yang alamiah diperlukan untuk memunculkan pemahaman yang baik antarsesama, maka perlu diadakan kegiatan yang dilakukan berkelompok. Pada kegiatan berkelompok melibatkan berbagai etnis. Misalnya pada pembentukan tim basket, volly, pentas drama, pramuka, dan sebagainya (Tan, 2006:38). Kendala yang dihadapi oleh pondok pesantren berupa pengajar yang belum memahami tentang kehidupan dan pengajaran pondok pesantren, karakter santri yang berbeda-beda, orang tua santri yang tidak mendukung pendidikan di pondok, serta orang tua yang tidak meneruskan pendidikan pondok pesantren ketika santri berada di rumah (Sutrisno, 2017:509).

Gagasan multikultural juga terdapat pada nilai-nilai ajaran Islam yaitu tentang penciptaan manusia yang berasal dari berbagai suku dan bangsa yang membedakan mereka di hadapan Sang Pencipta hanyalah tingkat ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk berhubungan baik antara sesama manusia yang berasal dari berbagai perbedaan sebagai bentuk dari tugas muslim sebagai pemimpin di muka bumi (*khalifatullah fil ardl*). Nilai-nilai ajaran Islam yang sering digunakan untuk menghargai dan menghormati keragaman dan perbedaan dalam lingkup masyarakat luas dalam hal toleransi beragama yaitu “bagimu agamamu, dan bagiku (Islam) agamaku” (Samsuri dan Marzuki, 2016: 27-28).

Setelah memahami berbagai latar belakang mengenai pendidikan multikultural, pesantren ialah salah satu tempat yang dapat dijadikan sebagai model implementasi dari pendidikan multikultural. Pesantren merupakan tempat yang tepat bagi pendidikan multikulturalisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa

hal, yang pertama, dunia pesantren telah berhubungan dengan keberagaman opini seperti yang terdapat pada kitab-kitab kuning. Kedua, pesantren dengan perantara kyainya sebagai agen budaya masyarakat setempat (*agent of culture broker*). Ketiga, pesantren berada dalam lingkup masyarakat budaya Indonesia yang beragam (Ghofur, 2011:300).

Pada konteks inilah, penelitian Abdullah Aly yang berjudul Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren (Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta) ini menemukan korelasinya. Dalam penelitiannya, Abdullah Aly menemukan nilai fundamental dari kurikulum pendidikan di PPMI Assalam adalah kemajemukan, yaitu pendidikan multikultural yang mampu menerobos berbagai perbedaan. Abdullah Aly mengutarakan bahwa beberapa sikap berikut sangat dijunjung tinggi oleh civitas akademika PPMI Assalam Surakarta, yaitu sikap menerima, mengakui, dan menghargai keragaman (Aly, 2011:338).

Dalam menjalankan pendidikan karakter elemen yang penting dan dikembangkan dari multikultural kepada siswa ditandai dengan perbedaan budaya, ras, etnis, dan agama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menyadarkan siswa bahwa kita sebenarnya hidup dalam keadaan pluralisme, pendidikan karakter mencakup nilai yang bersinergi dengan multikulturalisme. Nilai-nilai karakter merupakan titik awal dari nilai demokrasi, toleransi, kepedulian dan sebagainya. Dan apabila nilai-nilai tersebut diarahkan ke dalam sifat multikultural yang berkomitmen untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua elemen (Handayani dan Indartono, 2016:516).

Pernyataan diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Supriyanto dan Wahyudi (2017:61) fungsi dari karakter toleransi adalah untuk menumbuhkan kompetensi multikultural siswa. Banyaknya kasus intoleransi dapat dilakukan tindakan preventif melalui pemberian materi pendidikan karakter di sekolah. Pada karakter toleransi terdapat tiga aspek, yaitu (1) aspek kedamaian dengan indikator peduli, ketidaktakutan, dan cinta, (2) aspek menghargai perbedaan dan individu dengan indikator saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan dengan orang lain, dan menghargai diri sendiri, (3) aspek kesadaran dengan indikator menghargai kebaikan dari orang lain, terbuka, mau menerima, kenyamanan dalam hidup, dan kenyamanan dengan orang lain.

Penulis memberikan kesimpulan tentang karakter kewarganegaraan multikultural dapat disimpulkan dari nilai PPKn yang memperkuat dan membangun karakter warga negara Indonesia memahami dan mampu untuk melaksanakan nilai dan etika PPKn tentang karakter kewarganegaraan multikultural ketika berada di suatu komunitas atau pada ruang lingkup yang lebih besar yaitu dalam bernegara yang dapat menerima dan menghargai segala sesuatu perbedaan yang ada serta diharapkan mempunyai sikap cinta sesama manusia, setia kawan, demokrasi, keberagaman atau plural, saling menghormati, toleransi, kepedulian dan menghargai antar anggota masyarakat.

#### **e. Nilai Karakter Kewarganegaraan Multikultural**

Nilai karakter kewarganegaraan multikultural merupakan penggabungan karakter dari warga negara didalam kehidupan yang bersifat multikultur atau beranekaragam. Berikut adalah penggabungan nilai karakter kewarganegaraan

multikultural. Nilai-nilai publik operatif adalah sesuatu yang dihargai khalayak umum sebagai bagian dari identitas bersama dan menjadi pondasi untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Pengaturan nilai universal baik di area umum maupun pribadi yang dinyatakan oleh Parekh, berhubungan dengan kebebasan, keadilan atau persamaan, menghormati dan toleransi. nilai-nilai publik operatif adalah sesuatu yang dihargai khalayak umum sebagai bagian dari identitas bersama dan menjadi pondasi untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Pengaturan nilai universal baik di area umum maupun pribadi yang dinyatakan oleh Parekh, berhubungan dengan kebebasan, keadilan atau persamaan, menghormati dan toleransi (Parekh, 2008:474).

Pembelajaran nilai karakter dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang makna akhlak yang baik, hubungan interaksi, saling menghargai dan menghormati, menolong, melaksanakan aturan, menghargai kebersamaan dan perbedaan, hidup rukun, toleransi. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai tersebut pada setiap mata pelajaran atau bidang studi (Machmud, 2011:68). Pesantren sebagai situs kewarganegaraan adalah tempat menabur identitas dan semangat agama dan kebangsaan bagi warga negara yang partisipatif, aktif, peduli, sensitif dan bertanggung jawab, nilai yang sesuai adalah peduli (Muwafiq dan Samsuri, 2017:183).

Kewarganegaraan harus menyediakan keakraban dan kenyamanan, dan juga menjadi penyangga dari kebudayaan suatu negara, kehidupan sosial dan politik, pada rencana atau visi masa depan pencapaian serta kegagalan, melebihi rasa solidaritas istilah yang menjelaskan sikap dari saling menerima, kerjasama

dan saling mendukung, di waktu yang dibutuhkan, melampaui perbedaan mayoritas agama dan mayoritas keanggotaan yang merupakan dasar dari kebijakan sosial (Kymlica, 2011:10).

Karakter kewarganegaraan multikultural dapat dikatakan juga sebagai karakter toleransi karena isinya memuat persatuan dan kesatuan. Berikut adalah nilai karakter toleransi dalam pandangan Supriyanto dan Wahyudi, (2017: 66-67) adalah sebagai berikut.

(1) Aspek kedamaian

- a. Nilai peduli penerapannya adalah membantu teman yang berasal dari luar daerah ketika terkena musibah, memahami bahasa teman yang berasal dari luar daerah, mendengarkan dan menghargai teman yang sedang berbicara didepan kelas.
- b. Nilai ketidaktakutan penerapannya adalah membantu teman dari luar daerah yang memerlukan alamat dan nomor telepon, mau membantu teman yang dikucilkan oleh teman-teman lain.
- c. Nilai Cinta penerapannya adalah Mau berdiskusi untuk menemukan solusi dari suatu masalah, Menghargai teman yang mempunyai pendapat lain

(2) Aspek menghargai perbedaan dan individu

- a. Nilai saling menghargai satu sama lain penerapannya adalah Berteman dengan teman yang berasal dari berbagai daerah, Memberi salam kepada teman dari luar daerah

- b. Nilai menghargai perbedaan orang lain penerapannya adalah Berteman tanpa membedakan warna kulit, Tidak membedakan teman berdasarkan kekayaan
- c. Nilai menghargai diri sendiri penerapannya adalah Menyukai perbedaan yang ada, Menyukai diskusi dengan teman lain

(3) Aspek Kesadaran

- a. Nilai menghargai kebaikan orang lain penerapannya adalah Senang jika diberikan saran oleh orang lain
- b. Nilai terbuka penerapannya adalah Melakukan musyawarah ketika ada masalah dengan teman, mau bermusyawarah dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, Mau menerima kritik dan saran dari teman dan guru
- c. Nilai kenyamanan penerapannya adalah mau bergaul dengan teman tanpa membedakan latar belakang, mau bergaul dengan teman tanpa membedakan latar belakang.

**B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini mengkaji dari beberapa hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai bahan referensi, yaitu:

1. Penelitian dari Rosyida pada tahun 2016 tentang “Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan MI dalam Meningkatkan Karakter Siswa Berbasis Tradisi Pesantren”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan karakter yang ada dalam pesantren terbentuk melalui metode pembelajaran, tingkah laku, aktivitas spiritual, dan teladan yang baik dari ustadz dan kyai.

Persamaan dari penelitian ini adalah penerapan pelajaran PPKn terhadap karakter santri, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah peran dari pelajaran PPKn untuk membina karakter santri yang multikultural dan yang bertempat di Pondok pesantren Ma'had Al Muqoddasah Li Tahfidil Qur'an Ponorogo.

2. Penelitian dari A.Muchaddam Fahham pada tahun 2013 tentang "Pendidikan Karakter Di Pesantren". Hasil dari penelitian tersebut adalah panca jiwa pondok pesantren merupakan hal pokok terciptanya karakter di Pondok pesantren Ma'had Al Muqoddasah Li Tahfidil Qur'an Ponorogo, nilai tersebut adalah keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan yang dilandasi oleh semangat agama, dan kebebasan. Disamping itu ada motto pondok pesantren yaitu berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Selain dari motto dan pancajiwa pondok, karakter di pondok terbentuk dari pembelajaran, pembentukan budaya pesantren, kegiatan kurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Persamaan dari penelitian ini adalah penelitiannya bertempat di Pondok pesantren Ma'had Al Muqoddasah Li Tahfidil Qur'an Ponorogo dan menganalisa tentang karakter santri. Penelitian ini menggunakan penerapan dari PPKn yang digunakan sebagai pembinaan karakter kewarganegaraan yang multikultural. Hal tersebut yang membedakan penelitian ini dengan yang lainnya.
3. Penelitian dari Samsuri dan Marzuki yang dilakukan pada tahun 2013 dengan judul "Pembentukan Karakter Kewargaan Multikultural dalam Program Kurikuler di Madrasah Aliyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta". Hasil dari

penelitian tersebut adalah pembentukan karakter kewargaan multikultural di Madrasah Aliyah serta upaya untuk menghubungkan antara identitas Islam dengan kebangsaan di Madrasah Aliyah. Penguatan integrasi terkait dengan nilai-nilai Islam dan kebangsaan ke dalam bentuk multikultural pendidikan Islam Indonesia yang modern perlu dijelaskan lebih mendalam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian adalah fokus penelitian tentang pembentukan karakter kewarganegaraan multikultural. Sedangkan perbedaannya adalah perbedaan lokasi penelitian dan fokus penelitian yaitu tentang penerapan pembelajaran PPKn.

### **C. Alur Pikir**

Permasalahan yang berkaitan dengan karakter kewarganegaraan multikultural adalah beraneka ragam suku bangsa yang ada di dalam pesantren karena siswa terdiri dari berbagai macam daerah se-Indonesia dan bahkan dari luar negeri seperti Malaysia, Brunai Darussalam dan Thailand.

Berikut ini adalah peran dari guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya untuk menciptakan karakter kewarganegaraan multikultural adalah : Guru PPKn memberi arahan pembelajaran tentang nilai-nilai pendidikan karakter dan pendidikan multikultural karena kita hidup di Indonesia dengan segala macam perbedaan, maka guru berperan untuk mengajarkan siswa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Diharapkan siswa dapat memahami apa yang diajarkan dari guru PPKn sehingga akan tercipta sikap toleransi antara berbagai suku di lingkungan pondok.

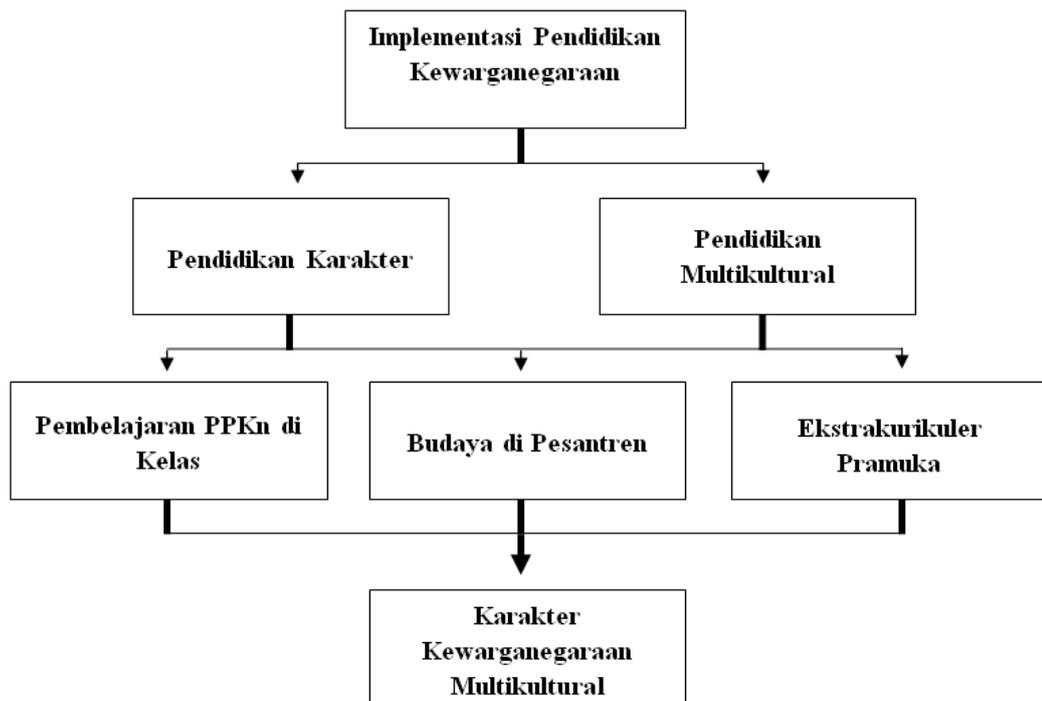
Peran dari siswa dalam menanamkan karakter kewarganegaraan multikultural adalah dengan memahami guru yang mengajarkan tentang multikulturalisme dan perbedaan yang ada di lingkungan sekolah serta diharapkan siswa dapat mengikuti kegiatan seperti ekstrakurikuler di pondok pesantren seperti Pramuka, dengan mengikuti ekstrakurikuler yang diikuti oleh teman-teman dari berbagai daerah, diharapkan dapat menciptakan karakter kewarganegaraan yang multikultural dan tentunya akan membuat siswa lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa peran dari guru PPKn sangat penting dalam terwujudnya karakter kewarganegaraan multikultural, peran dari organisasi seperti Pramuka juga membantu dalam terlaksananya karakter kewarganegaraan multikultural, diharapkan siswa mampu menjalankan arahan tersebut. Penjelasan dari penelitian ini menggunakan kajian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada konteks di sekolah.

Selanjutnya pengaruh dari budaya pesantren terhadap karakter kewarganegaraan multikultural, faktor yang membuat pengaruh adalah kyai, siswa meneladani kyai dari sifat dan tingkah laku keseharian. Karena didalam pesantren peran kyai sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang ditiru dari kyai adalah karakter, gaya, model dan pemikirannya. Dan yang terakhir menggunakan ekstrakurikuler pramuka sebagai pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural, dengan kegiatan-kegiatan dari pramuka dapat membina karakter kewarganegaraan multikultural.

Penjelasan tersebut merupakan langkah yang dicermati dalam melaksanakan penelitian ini. Alur pikir tersebut dijelaskan supaya pembaca mudah memahami tujuan, maksud, dan konten yang ada dalam penelitian.

Untuk mempermudah pemahaman alur pikir dalam penelitian ini, dapat dilihat gambar 1 berikut.



Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penelitian  
(Sumber: Analisis Peneliti, 2019)

#### **D. Pertanyaan penelitian**

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi pendidikan kewarganegaraan melalui pendidikan karakter dalam upaya pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural yang dilakukan melalui:

- a. Bagaimana implementasi pembelajaran PPKn melalui pendidikan karakter dalam upaya pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural di Pondok pesantren Al Muqoddasah Ponorogo?
  - b. Bagaimana implementasi Budaya pesantren melalui pendidikan karakter dalam upaya pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural di Pondok pesantren Al Muqoddasah Ponorogo?
  - c. Bagaimana implementasi Ekstrakurikuler pramuka melalui pendidikan karakter dalam upaya pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural di Pondok pesantren Al Muqoddasah Ponorogo?
2. Bagaimana implementasi pendidikan kewarganegaraan melalui pendidikan multikultural dalam upaya pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural yang dilakukan melalui:
- a. Bagaimana implementasi pembelajaran PPKn melalui pendidikan multikultural dalam upaya pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural di Pondok pesantren Al Muqoddasah Ponorogo?
  - b. Bagaimana implementasi Budaya pesantren melalui pendidikan multikultural dalam upaya pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural di Pondok pesantren Al Muqoddasah Ponorogo?
  - c. Bagaimana implementasi Ekstrakurikuler pramuka melalui pendidikan multikultural dalam upaya pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural di Pondok pesantren Al Muqoddasah Ponorogo?
3. Bagaimana pengamalan nilai karakter kewarganegaraan multikultural oleh santri di pondok pesantren Al Muqoddasah Ponorogo:

- a. Bagaimana pengamalan nilai karakter kewarganegaraan multikultural dalam pembelajaran PPKn di kelas?
  - b. Bagaimana pengamalan nilai karakter kewarganegaraan multikultural melalui budaya Pesantren?
  - c. Bagaimana pengamalan nilai karakter kewarganegaraan multikultural dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural di Pondok Pesantren Ma'had Al Muqoddasah Ponorogo:
- a. Apa faktor pendukung dan penghambat pembelajaran PPKn dalam pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural di Pondok Pesantren Al Muqoddasah Ponorogo?
  - b. Apa faktor pendukung dan penghambat budaya Pesantren dalam pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural di Pondok Pesantren Al Muqoddasah Ponorogo?
  - c. Apa faktor pendukung dan penghambat ekstrakurikuler Pramuka dalam pembinaan karakter kewarganegaraan multikultural di Pondok Pesantren Al Muqoddasah Ponorogo?

